

Daftar Pustaka

Buku

- Afan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Eko Riyadi, dkk. *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012
- _____ *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007
- Erwin Muhammad, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011
- Hari Kurniawan, Muhammad Joni Yulianti, Muhammad Syafi'ie, G Sri Nur Hartanto, Mahrus Ali, Eko Riyadi, *Aksebilitass Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, penerbit: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2015;
- I Dewa Gede Palbuna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2008
- Jack Donnely, *Universal Human Right in Theory and Practice*, Cprnell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm:7-21. Juga Maurice Craston, *What are Human Right?* Taplinger, New York, 1973;
- Jimly Ashiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2005
- _____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi press, Jakarta, 2005
- Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- _____ *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999;
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media pratama, Jakarta, 2008
- _____ *dan Hermaily Ibrahim. Hukum Tata Negara Indonesia. cet VII*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Jakarta, 1988
- Mujaid Kumkelo, dkk, *Fiqh Ham (Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam)*, Setara Press, Malang, 2005
- Mujar Ibnu Syarif, *Hak-Hak Politik Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam*, Angkasa, Bandung, 2003;

- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- _____ Ilmu Negara, cetakan ke-1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Peter Baehr, dkk, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001
- Rhona K.M smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008
- Robert A.Dahl, *Analisa Politik Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1982
- Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010
- Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013
- Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2002
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Press, Malang, 2003
- Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Cetakan I, Kencana, Jakarta, 2011
- Tim penulis dari pusat studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008;
- Ubadillah U, *pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta 2000;

Jurnal

- Fahrudin Faiz, "Kompatibilitas Demokrasi dan Islam dalam Perspektif Khaled Abou El-Fadl" *Jurnal Review Politik*, No.2, Vol. 3, Desember 2013
- Erlina, *Access To Justice "Anak Di Luar Perkawinan"* *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, November 2012
- Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum", *Jurnal Hukum*, No. 3, Vol. 16, Juli 2009
- M. Syafi'ie, "Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Konstitusi*, Vol 9, No 4, Desember 2012

Sefriani, “*Kewenangan Negara Melakukan Pengurangan dan Pembatasan Terhadap Hak Sipil Politik*”*Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, November 2012

Undang-undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang : Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015

Data Internet

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21207/kelamnya-masa-depan-mantan-napi-di-kancah-politik>

<http://amikom.ac.id/research/index.php/STI/article/view/7006>

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11543#.V9KGcqIXUaB>